



PEMBELAJARAN YANG BERKELANJUTAN
LAPORAN TAHUNAN 2006 - 2007

DAFTAR ISI

Pengantar dari Direktur Eksekutif Yappika	1
• Aksi-Refleksi-Aksi	
Pengantar dari Ketua Dewan Pembina Yappika	3
Pembelajaran dari Kerja-Kerja Advokasi Kebijakan dan Partisipasi Basis	
• Pembelajaran dari Proses Advokasi Mitra TPLD di Sulawesi	5
Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Jaringan OMS di Kabupaten	
• Penguatan Jaringan OMS di Jeneponto Sulawesi Selatan	7
• Peningkatan Kapasitas OMS untuk Mendorong Advokasi Kebijakan Pelayanan Publik di Aceh	8
Mendorong Pemenuhan Hak dasar dan Partisipasinya Warga Negara	
• Konsultasi Publik RUU Pelayanan Publik	9
• Kampanye Simpatik untuk Mendukung Advokasi RUU Pelayanan Publik	9
• Belajar dari Inovasi Pelayanan Publik di Pemda Sragen dan Tarakan	10
• Penelitian Strategi Advokasi Mitra Program TPLD	12
• Hasil Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia	12
• Tempat <i>Ngadem</i> yang Mencerdaskan di Perpustakaan Yappika	13
Membangun dan Mempromosikan Kesukarelawanan	
• Mempromosikan Kesukarelawanan melalui Pelatihan Manajemen Relawan	15
• Peringatan Hari Relawan Sedunia ke-21	16
• Ajang Refleksi Tahunan Relawan Yappika	17
Soliditas OMS dalam Advokasi Kebijakan	
• Belajar dari JDA dalam advokasi RUU Pemerintahan Aceh	18
Galeri Aktivitas Yappika lainnya	
• Membangun Strategi Komunikasi melalui Yappika Life	19
• Peringatan 15 Tahun Yappika	20
• Kampanye Hak Pelayanan Kesehatan melalui Penyuluhan & Pemeriksaan Kesehatan Payudara	21
• Keikutsertaan dalam AEPF di Helsinki	21
Sinergi Kerja Yappika dalam Kemitraan	
• Program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)	23
• Advokasi RUU Pelayanan Publik	24
• Program Penguatan Kapasitas Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kabupaten	24
Keuangan	
• Statement Auditor, Hasil Audit 2006 & Laporan keuangan	25



Pengantar dari Direktur Eksekutif Yappika

Lili Hasanuddin

Seperti juga di beberapa negara demokrasi lainnya, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia memiliki peran yang signifikan sebagai medium penyampai sekaligus pelaku yang menyuarakan kepentingan-kepentingan yang tak terwakili oleh sektor negara dan pasar. Berbagai inisiatif telah digagas dan digulirkan OMS di Indonesia untuk mengisi ruang-ruang publik agar wacana yang berkembang tidak melulu didominasi oleh cara pikir pemegang kuasa maupun pemegang modal. Dorongan untuk terjadinya proses perencanaan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat rentan, serta mekanisme pengawasan untuk terjadinya akuntabilitas dan transparansi sektor negara dan pasar adalah contoh-contoh yang selama ini digeluti oleh berbagai kalangan OMS Indonesia.

Sebagai pihak yang berusaha mendorong perjalanan Indonesia ke arah yang lebih demokratis, tentu saja kalangan OMS dituntut untuk selalu responsif terhadap perkembangan yang terjadi dan secara terus menerus menelurkan gagasan-gagasannya untuk dikomunikasikan kepada berbagai kalangan, termasuk kepada publik untuk mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dalam konteks inilah maka OMS membutuhkan ketrampilan yang memadai untuk menggali data/informasi yang akurat dan mengemasnya menjadi produk-produk informasi yang relevan. Peran-peran OMS tidak akan memberikan pengaruh apapun jika apa yang disuarakan tidak memiliki basis data/informasi yang akurat. Sementara itu, kecerdikan dalam melihat situasi dan bagaimana menjadi pelaku yang pro-aktif menjadi tantangan tersendiri. Semua peran-peran yang dimainkan OMS tidak dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ada upaya belajar yang terus menerus.

Yappika sendiri berusaha membumikan pemahaman ini dalam kerja-kerja kesehariannya sepanjang periode 2006-2007. Kami banyak belajar mengenai berbagai hal, tidak hanya dari sesama kalangan OMS, tetapi juga menimba pembelajaran dari berbagai inisiatif yang dilakukan Pemda yang terbukti memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada warganya.

Hasil-hasil pembelajaran ini, kemudian kami sebarkan kepada kawan-kawan OMS lain di berbagai daerah untuk mendorong lahirnya inspirasi-inspirasi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kami fasilitasi juga kawan-kawan dari beberapa daerah untuk sama-sama mempelajari, mencermati dan mengkritisi pendekatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kami anggap memiliki inovasi tinggi.

Kami pun terus menarik inti pembelajaran dari setiap kegiatan yang telah kami lakukan guna memperbaiki kerja-kerja berikutnya. Dalam program penguatan kapasitas OMS kabupaten –bekerjasama dengan ACCESS—sebagai misal, dalam tahun ini kami lakukan evaluasi atas seluruh kerja, pendekatan, strategi dan metode yang telah kami lakukan sepanjang 3 tahun belakangan ini. Tidak hanya itu, bersama-sama dengan seluruh aktor di kabupaten, kami lakukan refleksi bersama untuk melihat apa kekuatan, kelemahan dan pembelajaran yang terjadi selama ini melalui sebuah pengukuran Indeks Masyarakat Sipil ke-2, sebagai lanjutan dari kegiatan serupa yang pernah kami lakukan tahun 2004.

Dalam program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)–kerjasama dengan USC Canada—kami melakukan studi untuk mempelajari dan mendokumentasikan strategi advokasi yang dilakukan oleh beberapa OMS di kabupaten. Kami ingin mempelajari dan menemukan faktor-faktor penguat keberhasilan advokasi yang dilakukan, tak lupa juga melihat faktor pelemah gagalnya kerja-kerja advokasi. Bagi kami, berhasil, tersendat, atau gagal sekali pun mengandung pembelajaran di dalamnya, karena itulah kami berusaha menguaknya dan menangkap esensinya. Dalam konteks kelembagaan, melalui ODST kami pun melakukan diskusi bersama dengan semua pemangku kepentingan di lembaga tersebut melalui penilaian partisipatif untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan atas kerja-kerja yang telah dilakukan Yappika terhadap kelembagaan mereka.

Kami merasakan manfaat besar dari siklus aksi-refleksi-aksi semacam ini. Pendekatan dapat diperbaiki, mekanisme kerja bisa dibenahi, dan strategi pun terbuka untuk diperbaharui adalah contoh-contoh kecil dari manfaat yang kami rasakan. Kami yakin seluruh proses belajar yang telah kami lewati belum tuntas, oleh karena itu akan terus kami lakukan pada masa-masa mendatang. Semuanya itu kami lakukan untuk terus memberi kontribusi bagi terciptanya demokratisasi di Indonesia.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu kami selama ini.

Jakarta, 18 Juni 2007

Lili Hasanuddin

Direktur Eksekutif



Pengantar dari Ketua Dewan Pembina Yappika

Dwi Astuti

Waktu terus berlalu sementara jalan menuju tatanan masyarakat yang demokratis makin panjang dan berliku. Kekuatan neoliberal yang anti demokrasi dalam mengatur seluruh sendi kehidupan berbangsa secara perlahan tapi pasti mulai nampak terlihat dan dirasakan. Pengaruh kuatnya pasar/modal dalam perumusan kebijakan nasional secara nyata dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih mengedepankan kepentingan modal daripada kepentingan rakyat.

Yappika yang sejak awal memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan masyarakat sipil agar lebih aktif dan berdaya terus berupaya agar dapat menelusuri jalan panjang penuh tantangan tersebut bersama mitra-mitranya.

Pertengahan tahun 2007 ini satu lagi langkah Yappika dalam penguatan masyarakat sipil telah ditapaki. Kerjasama Yappika dengan mitra melalui serangkaian program Advokasi Kebijakan, Peningkatan Kapasitas OMS, Soliditas OMS dalam Advokasi Kebijakan, Mendorong Pemenuhan Hak Dasar dan Partisipasi Warga Negara, Membangun dan Mempromosikan Kesukarelawanan, Galeri Aktivitas Yappika dan Sinergi Kerja Yappika dalam Kemitraan memberikan pengalaman berharga sebagai proses belajar bersama sekaligus membakar semangat untuk terus berkarya.

Salah satu buah manis yang dipetik dari kerja keras Yappika dan mitranya pada periode ini adalah keberhasilan dalam mendorong partisipasi public dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan lembaga desa serta dalam proses pembangunan. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat sipil dari campur tangan pihak lain yang berpotensi meminggirkannya. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya untuk selalu belajar dan meningkatkan kapasitas tak pernah pupus dilakukan oleh mitra Yappika dan masyarakat yang memperjuangkan keadilan.

Proses belajar inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi Yappika untuk terus melangkah dan berupaya agar dapat menjadi partner yang *compatible* bagi mitranya agar cita-cita bersama atas demokrasi yang bersumber dari kehendak dan aspirasi rakyat dapat terwujud. Setiap langkah merupakan pelajaran berharga yang patut dicatat dan direfleksikan karena Yappika memahami bahwa tidak ada yang dapat menggantikan proses belajar selain melakukannya sendiri.

Karena hari esok nan penuh harapan dalam meniti jalan panjang masih harus kita lalui, marilah eratkan jabat tangan, saling percaya dan terbuka dalam mengayunkan langkah bersama. Tak lupa kami haturkan terimakasih kepada seluruh mitra, donor, staf dan pengurus yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

Salam solidaritas,
Dwi Astuti

Ibarat perkembangan seorang manusia, Yappika telah tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Dalam proses perkembangan ini, Yappika telah menunjukkan komitmen dan karya nyata dalam berkontribusi kepada pembangunan demokrasi di negeri tercinta ini. Sebagai "kawan sepermainan", saya merasa bangga dengan apa yang telah dicapai selama ini oleh Yappika. Semoga Yappika semakin berkembang di masa mendatang.

(Hari Basuki, CIDA Jakarta)

Yappika dengan dukungan tenaga-tenaga muda, cerdas dan potensial mendedikasikan diri untuk membangun demokrasi dengan peran yang spesifik terutama dalam mengawal proses legislasi agar berjalan dengan baik. Kesan saya, meski tidak terlampau keras 'sangat', kritik yang disampaikan Yappika cukup tajam dengan argumentasi yang cukup memadai. Jika ada sejumlah LSM terkesan cenderung 'menggurui' dalam menyampaikan pandangan dan sikap politiknya, Yappika tampak lebih moderat dan toleran. Intensitas komunikasi orang perseorangan secara informal juga terpelihara dengan baik sehingga hal ini memudahkan penyamaan visi terhadap suatu isu.

Ke depan Yappika perlu membatasi konsentrasi gerakannya pada bidang tertentu yang dijadikan *core*-nya. Yappika saya harapkan menjadi icon dalam gerakan advokasi pelayanan publik.

(Syaifullah Makhsom, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKB)

Pembelajaran dari Kerja-Kerja Advokasi Kebijakan dan Partisipasi Basis

Pembelajaran dari Proses Advokasi Mitra TPLD di Sulawesi

Lima dari delapan lembaga di daerah Sulawesi yang didukung oleh program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD) berhasil mendorong disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mereka advokasi. Mereka adalah Yayasan Pendidikan Rakyat di Kota Palu – Sulawesi Tengah, KPPA dan YAMMI (keduanya berkantor di Palu) yang bekerja di Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah, YBS Palopo dan YTMi Makasar yang bekerja di Kabupaten Luwu – Sulawesi Selatan. Dari sisi isu, 4 di antara Perda tersebut berkaitan dengan isu sumber daya alam dan pengakuan akan hak rakyat dalam pengelolaannya, serta satu Perda mengenai “Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Proses Pembangunan Desa Kabupaten Donggala”.

Keberhasilan kerja-kerja advokasi yang dilakukan 5 lembaga tersebut setidaknya didukung oleh dua hal, yaitu, **pertama**, mengangkat isu yang berangkat dari apa yang dirasakan oleh kelompok masyarakat (korban). YPR di Palu dan YAMMI di Donggala serta YTMi di Luwu mengangkat persoalan nelayan tradisional yang terpinggirkan oleh beroperasinya alat tangkap ikan modern milik segelintir pengusaha dan pejabat. KPPA memperjuangkan kelompok perempuan yang selama ini tidak terakomodasi kepentingannya dalam kebijakan desa karena minimnya wakil perempuan dalam kelembagaan desa. YBS Palopo mengartikulasi dan mewadahi keresahan masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Lamasi (masyarakat adat di hulu, transmigran di tengah dan nelayan di hilir) yang seolah saling bertabrakan kepentingan saat berbicara mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di sepanjang Sungai Lamasi. Mereka mempertemukan berbagai kelompok tersebut dan memfasilitasi pembentukan organisasi yang menyatukan mereka dalam suatu forum bernama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamasi. Mereka juga mengajak warga untuk melihat persoalan lebih struktural, tidak lagi horisontal, yaitu dalam konteks relasi bahwa warga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban negaralah [pemerintah] memenuhi hak-hak warga tersebut. Melalui forum, masyarakat menyelesaikan konflik horisontal antara mereka dan berjuang bersama menuntut keadilan kebijakan dari negara.

Kedua, upaya tak kenal henti untuk meningkatkan kapasitas baik internal lembaga maupun masyarakat (korban). Tanpa upaya serius mengembangkan kapasitas, baik substansi (pendalaman dan pemahaman terhadap isu) maupun penguasaan teknis advokasi (riset, pengorganisasian masyarakat, *lobby*, kampanye) dan berbagai aspek lain yang relevan, maka lembaga akan kedodoran dalam mendorong isu.

Pada awalnya sebagian besar lembaga di atas, menyadari keterbatasan kapasitas yang mereka miliki, dan berpikir bahwa jika Ranperda yang mereka usung diterima Dewan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan, itu dianggap cukup berhasil. Namun dukungan sumber daya dari program TPLD ternyata memungkinkan mereka untuk lebih sering berdiskusi dan saling belajar, baik di antara staf lembaga, maupun antara staf lembaga dengan masyarakat, akademisi, wartawan, maupun pengambil kebijakan. Program TPLD juga memungkinkan mereka mengikuti dan melakukan training, magang dan bentuk pengembangan kapasitas lain yang relevan dengan kebutuhan. Seiring meningkatnya kapasitas tersebut, baik dalam substansi isu maupun teknis dan strategi advokasi, maka meningkat pula legitimasi mereka dihadapan pengambil kebijakan, kelompok strategis lain maupun masyarakat.

Kerjasama Yappika dengan para mitra program TPLD telah melahirkan 4 Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari usulan masyarakat sipil. Masing-masing adalah Peraturan Daerah No. 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pesisir dan Teluk Palu Kota Palu; Peraturan Daerah No. 12 tahun 2006 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Donggala; Peraturan Daerah No. 10 tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Donggala; dan Perda No. 9 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Daerah aliran Sungai Lamasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Ada banyak manfaat yang diperoleh bermitra dengan Yappika. Pertama, dari konsep penguatan jaringan antar lembaga. Setidaknya Yappika selama ini berhasil menjadi dapur untuk saling tukar pengalaman (keberhasilan/ kegagalan) dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Kedua, dalam hal penyusunan disain program yang akan diadvokasi. Yappika berhasil mendisain lebih dini dengan melibatkan para mitra di daerah untuk memberikan pendapatnya (opini) sehingga isu representasi sebagai alat legitimasi menjadi kuat.

Harapan ke depan, Yappika lebih mampu lagi mengelola berbagai pengalaman gerakan advokasi para mitra di daerah untuk kemudian menjadi sebuah alternatif gerakan yang lebih pas dan efektif dalam mendorong perubahan.

(Syamsudin, KOPEL, simpul MP3 Makassar)

Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Jaringan OMS di Kabupaten

Penguatan Jaringan OMS di Jeneponto Sulawesi Selatan

Berawal pada tahun 2004 sampai April 2007 Yappika bekerjasama dengan Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) melaksanakan Program “Pemanfaatan Index Masyarakat Sipil untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Sipil dalam Pengembangan Kabupaten” yang dijalankan di 8 Kabupaten (Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur) di 4 Propinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur). Program ini didorong untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta melakukan advokasi untuk keadilan sosial. Secara bertahap, program ini dimulai dengan studi pemetaan masyarakat sipil, lokakarya pengukuran indeks kesehatan masyarakat sipil tahap I, *working group action planning process*, kegiatan antara, lokakarya penyusunan rencana aksi dan lokakarya indeks kesehatan masyarakat sipil tahap II. Mitra kerja Yappika di setiap kabupaten adalah lembaga jaringan organisasi masyarakat sipil yang terbentuk pasca kegiatan lokakarya rencana aksi.

Dari sejumlah lembaga jaringan yang bermitra dengan Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) Turatea, Jeneponto, adalah salah satu yang dinilai menonjol karena perannya sebagai jaringan kerja berhasil mendorong partisipasi publik dalam proses advokasi kebijakan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Bahwa persoalan pemanfaatan air sebagai sarana produksi pertanian, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas PU. Oleh karena itu dalam proses perumusan kebijakan ini, AMS Turatea melibatkan berbagai kalangan yang memiliki hubungan dengan persoalan air seperti; PU (Pengairan), Pertanian, Bappeda serta GP3A (Gabungan Petani Pengguna dan Pemakai Air).

Melalui sejumlah upaya yang dilakukan oleh AMS Turatea, Draft Perda tentang “Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi” telah berhasil dirumuskan dan kini tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Jeneponto. Upaya *lobby* yang dilakukan ke Komisi C mendapat sambutan positif, bahkan isu kemiskinan dan perempuan yang tertera dalam substansi draft akan dijaga agar tetap masuk menjadi bagian yang utuh dari isi Perda.

Pencapaian yang optimal dari kerja-kerja AMS Turatea ini, selain karena faktor pemilihan isu yang cukup strategis, dukungan multipihak atas inisiatif jaringan juga faktor kesamaan prioritas isu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Peningkatan Kapasitas OMS untuk Mendorong Advokasi Kebijakan Pelayanan Publik di Aceh

Pada bulan September 2006, Yappika melakukan launching program Acehese Civil Society Organization Strengthening (ANCORS) di Banda Aceh. Program berdurasi 3 tahun ini merupakan salah satu program Yappika yang dikembangkan dalam rangka turut berkontribusi dalam proses pengembangan sistem pemerintahan yang baik di Aceh di luar sektor fisik. Tujuan utama program adalah (1) Memperkuat kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dan pihak-pihak strategis lainnya, sekaligus meningkatkan partisipasi publik secara inklusif dalam pengambilan keputusan menyangkut penyediaan pelayanan dasar bagi warga; (2) meningkatkan kapasitas *resource organisation* di tingkat propinsi untuk mendukung peningkatan ketrampilan OMS melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian masyarakat.

Sebelum perancangan program, Yappika terlebih dahulu melakukan kegiatan Pemetaan OMS di Aceh Pasca Tsunami. Temuan-temuan dari kegiatan penelitian tersebut menjadi salah satu dasar perancangan program. Kini program ANCORS dilakukan di 6 wilayah kabupaten dan mengangkat isu pelayanan hak dasar khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan di wilayah Aceh. Isu ini dirasa cukup mendesak di samping pembangunan fisik pasca tsunami di Aceh. Enam wilayah kerja tersebut adalah Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Singkil. Sebanyak 14 mitra LSM lokal di tingkat kabupaten dan 2 mitra jaringan OMS di tingkat provinsi telah dipilih untuk bersama-sama mengembangkan program ini di wilayah kerja mereka.

Guna menggali pembelajaran dari pelaksanaan program yang telah dilakukan untuk perbaikan ke depan, pada bulan Maret 2007, diadakan pertemuan mitra program ANCORS di kota Banda Aceh. Pertemuan ini menghasilkan refleksi atas pola relasi, kebutuhan peningkatan kapasitas mitra kabupaten dan fasilitator wilayah serta mekanisme komplain di antara pelaksana program.

Aku memimpikan Yappika yang mandiri dan lebih dahsyat dari hari ini.

(Butet Kertaredjasa, seniman)

Mendorong Pemenuhan Hak dasar dan Partisipasipasi Warga Negara

Konsultasi Publik RUU Pelayanan Publik

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) yang dibentuk pada Januari 2006 lalu, saat ini tengah bergiat melakukan advokasi terhadap Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik. Hingga memasuki tahun kedua keberadaan RUU Pelayanan Publik di Komisi 2 DPR RI, belum ada kejelasan kapan RUU tersebut akan dibahas dan disahkan. Dalam kondisi ketidakjelasan tersebut, MP3 memanfaatkannya untuk melakukan berbagai langkah advokasi guna memberikan masukan-masukan terhadap isi maupun proses pembahasan RUU.



Serangkaian kegiatan konsultasi publik untuk meminta tanggapan mengenai RUU Pelayanan Publik digelar baik di Jakarta maupun di beberapa daerah, di antaranya Makassar, Palu, Kupang, Yogyakarta dan Bandung. Penyebaran petisi dukungan juga dilakukan untuk membuka ruang bagi publik agar turut serta mempengaruhi RUU Pelayanan Publik yang adil dan berkualitas. Sementara itu, proses pematangan substansi dilakukan oleh MP3 untuk memperjelas posisi, memperkuat argumentasi dan menyiapkan draft sandingan baik berupa naskah akademis maupun RUU. Proses setahun terakhir ini (2006–red) semakin mengukuhkan MP3 dalam memandang RUU Pelayanan Publik agar lebih berorientasi pada pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Paradigma pemenuhan hak dasar inilah yang menjadi roh dan semangat bagi MP3 untuk tetap bergiat melakukan advokasi RUU Pelayanan Publik hingga kelak RUU tersebut dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

Kampanye Simpatik untuk Mendukung Advokasi RUU Pelayanan Publik

Sejumlah anak muda dengan rompi hitam bertuliskan "Saatnya Mendorong Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas" di bagian punggung, kelihatan bersemangat membagi-bagikan brosur dan petisi dukungan berwarna orange kepada orang-orang yang tengah lalu lalang di Stasiun Kota Jakarta tanggal 28 Maret 2007.



Mereka ditemani oleh 3 orang berkostum lebah madu yang membawa papan bertuliskan "Buruan, dukung kami! Klik www.yappika.or.id!".

Mereka adalah relawan Yappika yang tengah melakukan kampanye untuk mendukung advokasi RUU Pelayanan Publik yang tengah giat dilakukan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Aksi serupa juga telah dilakukan oleh para relawan di beberapa tempat keramaian di Jakarta seperti Pasar Baru dan Bundaran HI.

Kampanye ini dilakukan berbeda dari biasanya, yaitu dengan menggunakan inovasi baru seperti mascot lebah madu dan *sandwich board* sebagai media visual kampanye untuk menarik minat dan perhatian publik. Cara ini dirasa cukup berhasil. Sekitar 1000 buah petisi dukungan terhadap advokasi RUU Pelayanan Publik untuk mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas berhasil dikumpulkan para relawan dan akan disampaikan oleh MP3 kepada Komisi 2 DPR RI yang tengah membahas RUU Pelayanan Publik. Sekitar 5000 orang menyaksikan aksi para relawan di 3 pusat keramaian di Jakarta tersebut baik membaca tulisan di *sandwich board* maupun brosur-brosur yang dibagikan. Kampanye simpatik ini melengkapi kegiatan kampanye sebelumnya yang dilakukan oleh para relawan Yappika di mall Cibubur Junction dengan menggelar atraksi seni dan memajang spanduk besar bertuliskan "Saatnya Mendorong Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas" di salah satu sudut keramaian mall tersebut.

Belajar dari Inovasi Pelayanan Publik di Pemda Sragen dan Tarakan

Yappika berkolaborasi dengan FISIP UI melakukan studi Inovasi Pemerintah Daerah Sragen (Agustus dan September 2006) dan Tarakan (Februari 2007). Studi ini bertujuan untuk memetakan inovasi Pemda dalam rangka memotret *best practices* yang memungkinkan direplikasi di daerah lain serta ingin menunjukkan bahwa dengan digulirkannya otonomi daerah, beberapa Pemda inovatif telah berhasil meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi daerah lain serta mendorong publik untuk menuntut Pemda setempat melakukan perbaikan pelayanan publik.

Dari hasil pemetaan program inovasi di Sragen, ditemukan sedikitnya ada 29 program inovasi. Dari 29 program inovasi tersebut, dipilih tiga program inovasi yang kemudian diuji tingkat inovasinya. **Pertama**; kemudahan perizinan melalui *one stop service* Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus surat perijinan; penyerderhanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara drastis dari segi persyaratan, mekanisme, jangka waktu dan biaya.

Kedua; pelatihan ketrampilan masyarakat di Badan Diklat yang telah memberikan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat (tidak hanya PNS) dan penyelenggaraan pelatihan yang melibatkan masyarakat. **Ketiga;** program dana bergulir. Inovasi terlihat dalam hal adanya mekanisme jaminan sesuai kemampuan masyarakat, dimungkinkannya mekanisme tanggung-renteng, serta pemanfaatan lembaga-lembaga penghimpunan keuangan masyarakat.

Ada beberapa rekomendasi terhadap pengembangan inovasi program di Pemda Sragen, salah satunya berkaitan dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program. Rekomendasi ini didasari temuan hasil penilaian masyarakat yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat dalam hal partisipasi dalam penentuan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program masih belum optimal. Ke depan Pemda perlu membuka lebih luas ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan program dan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi.

Untuk pemerintah Tarakan, dari hasil pemetaan program inovasi, ditemukan sedikitnya 18 program inovasi. Dari 18 program inovasi tersebut, dipilih tiga program inovasi kemudian diuji tingkat inovasinya. **Pertama;** program manajemen sekolah baik negeri maupun swasta dalam hal pemberian subsidi berdasarkan kategori prestasi dan kemampuan finansial, tunjangan kesejahteraan guru, dan perbaikan infrastruktur; perubahan status dari kepala sekolah menjadi direktur sekolah diikuti perubahan tupoksi; penentuan sekolah percontohan; serta peningkatan kualitas sekolah menuju sekolah berstandar internasional. **Kedua;** program pemberlakuan tarif dasar listrik (TDL) lokal. Inovasi terlihat di antaranya dalam penjaminan kesinambungan ketersediaan listrik dengan TDL serta penerapan mekanisme pembayaran rekening listrik secara Prabayar dengan alat penghitung kilometer listrik digital. **Ketiga;** pengelolaan pasar tradisional bermitra dengan swasta. Inovasi Pemda terlihat dalam hal pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisional, diterapkannya transparansi & akuntabilitas saat penyelenggaraan tender pengelola pasar, pelibatan pedagang lokal sebagai bagian dari manajemen pengelolaan pasar, pemenuhan kebutuhan finansial secara mandiri serta perbaikan infrastruktur dan kualitas kesehatan pasar.

Beberapa manfaat yang diterima masyarakat terkait dengan berbagai inovasi Pemda Tarakan di atas di antaranya adalah: (a) dengan diterapkannya TDL di Kota Tarakan masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang tetap dan terjangkau. Sebelumnya, Kota Tarakan, seperti umumnya daerah di Kalimantan dan Bali menghadapi masalah kurangnya pasokan listrik. Hal ini tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, misalnya rumah tangga, dunia pendidikan dan kesehatan, serta industri. (b) melalui privatisasi pengelolaan pasar tradisional pemda melokalisir para pedagang kaki lima di satu tempat. Hal ini lebih menjamin keamanan lapak si pedagang dan tentunya mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja. Pengelolaan di tangan swasta juga menunjukkan hasil lebih baik, terutama karena menerapkan model pengelolaan kemitraan. Pengurus pasar adalah gabungan antara pihak swasta dan perwakilan pedagang. Dimana, pengurus secara bersama-sama menentukan aturan-aturan pokok, termasuk harga sewa lapak yang terjangkau oleh para pedagang.

Penelitian Strategi Advokasi Mitra Program TPLD



Program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD) sudah berjalan tiga tahun. Yappika, berkerja sama dengan 22 lembaga mitra telah melaksanakan program bersama di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa capaian sekaligus kendala dialami oleh para mitra dalam menjalankan berbagai inisiatif program TPLD. Untuk memahami hal tersebut, sejumlah mitra yang terlibat dalam pengelolaan maupun sebagai pelaksana kegiatan di tingkat lapangan, telah berkolaborasi menyusun dan melaksanakan suatu agenda penelitian yang mencoba menggali berbagai informasi untuk menarik pelajaran dari berbagai strategi advokasi yang dibangun.

Penelitian kolaboratif ini ingin mengungkapkan berbagai pengalaman terkait dengan perencanaan program; menganalisis situasi politik yang ada ketika program dijalankan; pengalaman dalam merumuskan pilihan bangunan program, dalam hal ini apakah akan menggunakan pendekatan partisipatoris atau elitis. Ketika perencanaan dilakukan dengan cara yang partisipatoris dengan melibatkan masyarakat maka didalamnya juga mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan politik, pengorganisasian dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pada sisi lain, pengalaman yang muncul juga menyangkut pola-pola relasi yang dibangun mitra dalam mendekati pengambil kebijakan. Di sini dibahas tentang alat kampanye, membangun jaringan dan teknik - teknik pengorganisasian yang mendorong pemberdayaan rakyat.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia



Pada awal Maret – Agustus 2006 Yappika telah menggagas suatu program yang berjudul “Mendorong pelaksanaan desentralisasi yang membuka ruang partisipasi politik rakyat, efektivitas tata-pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat”. Program kerjasama dengan Partnership for Government Reform ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi sepanjang tahun 2001 – 2005.

Penelitian yang dilaksanakan di 15 kabupaten/kota dan 4 provinsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi masih jauh dari tujuan yang diharapkan, meskipun harus diakui bahwa otonomi daerah telah menunjukkan sejumlah kemajuan dan banyak dinamika. Di sejumlah daerah rasa percaya diri pemerintah daerah meningkat ditandai dengan gagasan-gagasan inovatif yang beragam dalam upaya mendorong partisipasi warga dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Beberapa daerah mulai lebih terbuka dan akomodatif.

Desentralisasi juga ikut merangsang pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang muncul untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengisi ruang-ruang baru yang hadir akibat adanya otonomi daerah. Namun demikian, terkait dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah, masih diwarnai oleh dominannya eksekutif dalam penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses perencanaan anggaran di daerah masih ditentukan atau secara kuat didominasi oleh kepala daerah dan perangkatnya.

Dalam hubungannya dengan akses warganegara untuk memperoleh informasi, di daerah-daerah penelitian tidak ditemukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap dokumen-dokumen atau data-data penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah belum merasa bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi. Di beberapa daerah terdapat media informasi rutin dari pemerintah, akan tetapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya ditandai dengan minimnya penyebaran informasi kepada masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat karena belum ada Peraturan Daerah yang mewajibkan hal tersebut. Informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih merupakan "kebaikan" yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Melihat dari indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian nilai-nilai seperti kesetaraan, persamaan, pemenuhan hak-hak dan kebebasan dasar, keadilan, transparansi, akses memperoleh informasi, partisipasi, *feed-back* dan kontrol masyarakat, dan sebagainya; dengan beberapa ilustrasi di atas, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sepanjang tahun 2001 - 2005 belum memuaskan.

Tempat *Ngadem* yang Mencerdaskan di Perpustakaan Yappika

Awalnya Riska dan kawan-kawannya sekedar "ngadem" di Perpustakaan Yappika. Maklum udara di kawasan Pedati Jakarta Timur



sangat panas kalau siang hari.

Perpustakaan Yappika yang *full* AC memberikan kenyamanan dari sengatan panas matahari. Namun melihat beragamnya buku yang disediakan di rak perpustakaan ini, anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah Ruhul Ulum ini akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota perpustakaan Yappika. Bahkan mereka kemudian mengajak kawan-kawannya untuk berkunjung ke Perpustakaan Yappika yang sekarang sudah mempunyai koleksi 400 lebih buku anak-anak dan 2000 lebih buku umum.

Pada awal pembentukannya, perpustakaan hanya bertujuan untuk melayani kebutuhan informasi, literatur dan bahan bacaan dari seluruh staf dan relawan Yappika. Namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya permintaan dari kalangan akademisi dan masyarakat umum, maka mulai tanggal 8 Juli 2006 bertepatan dengan ulang tahun Yappika ke 15, perpustakaan mulai dibuka untuk umum. Berbeda dengan perpustakaan pada umumnya, perpustakaan Yappika didesain menyerupai taman bacaan yang bersifat informal, dimana untuk pengunjung disediakan tempat 'lesehan' yang dilengkapi bantal untuk membaca. Desain perpustakaan sengaja dibuat santai agar menimbulkan suasana betah dan nyaman, mengingat pengunjung perpustakaan Yappika yang beragam, baik dari kalangan akademisi, LSM, anak-anak dan masyarakat umum.

Perpustakaan ini tidak hanya sebagai tempat membaca buku, namun berbagai kegiatanpun dilakukan di tempat ini seperti kelas menggambar dan mewarnai setiap hari Kamis, kelas mendongeng setiap hari Rabu, dan pada even-even tertentu juga dilakukan pemutaran film dan ketrampilan meronce dari barang bekas. Di perpustakaan Yappika juga membagikan buku-buku terbitan Yappika secara gratis. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan informasi dan wacana tentang masyarakat sipil dan demokrasi secara luas pada masyarakat sekitar sehingga dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja Yappika khususnya dan gerakan masyarakat sipil pada umumnya bisa semakin luas. Sejak dibuka untuk umum hingga bulan Maret 2007 ini, sekitar 5600 orang tercatat telah mengunjungi perpustakaan Yappika, sebagian di antaranya adalah para pengunjung lama yang seringkali datang tiap hari.

Mereka (Yappika) adalah segelintir dari generasi yang tak kenal lelah mengawal demokratisasi masyarakat sipil yang hingga kini masih tak mudah beranjak... dan semua itu berjalan dinamis, progresif dan efektif karena suasana demokratis dan proses regenerasi yang luar biasa di tubuh organisasi mereka.

(Jilal Mardhani, Direktur Komisaris PT Jelang Era Global)

Membangun dan Mempromosikan Kesukarelawanan

Mempromosikan Kesukarelawanan melalui Pelatihan Manajemen Relawan

Pada tanggal 22 – 27 Agustus 2006, Yappika bekerjasama dengan VSO (Voluntary Service Overseas) Bahaginan Filipina, mengadakan pelatihan manajemen relawan tingkat dasar. Pelatihan diikuti oleh 12 orang peserta dari kalangan LSM yang tersebar di beberapa daerah, yaitu Malang Corruption Watch (MCW), National Democratic Institute (NDI), PKBI, Yayasan Bumi Sawerigading Palopo (Sulawesi Selatan), Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba (Sulawesi Selatan), Yayasan Pendidikan Rakyat Palu (Sulawesi Tengah), KPPA Sulawesi Tengah, Jatam, KAPETA, Save Emergency for Aceh (SEFA) dan Yayasan Triton Papua.



Pelatihan difasilitasi oleh pelatih dari VSO Bahaginan Filipina dan koordinator program regional VSO SPARK. Pelatihan manajemen relawan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana pengembangan relawan yang telah dilakukan oleh Yappika sejak tahun 2003, serta merupakan implementasi perencanaan strategis dalam hal mempromosikan manajemen relawan yang efektif yang dibuat pada waktu salah satu staf Yappika mengikuti kursus singkat tentang manajemen relawan di Filipina bulan September tahun 2005 lalu.

“Pelatihan seperti ini sangat membantu kami dalam pengelolaan dan sosialisasi kerelawanan ke segala lapisan masyarakat,” kata Diediet, peserta dari Yayasan Kapeta, seorang relawan yang mengurus penderita HIV/AIDS. Sementara itu Hisma Kasman dari YBS Palopo mengungkapkan bahwa masih banyak orang yang salah pengertian tentang makna dan tujuan kerelawanan. Padahal kerelawanan menurutnya sesuatu yang sudah ada di masyarakat Indonesia sejak dulu, namun saat ini mengalami kemunduran karena orang cenderung mengukur sesuatu dengan hitungan ekonomi.

Peringatan Hari Relawan Sedunia ke-21



Tanggal 5 Desember adalah hari penting bagi para relawan sedunia. Dua puluh satu tahun yang lalu, Agustus 1985, PBB menetapkan tanggal tersebut sebagai hari relawan sedunia guna memberikan penghargaan terhadap kontribusi para relawan di dunia terhadap pembangunan sosial serta mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam kerja-kerja kesukarelawan. Pada peringatan yang ke-

21 kali ini, Yappika bersama-sama dengan 4 organisasi lain yaitu The National Democratic Institute (NDI), Dompot Dhuafa, UN Volunteer (UNV), PACIVIS, ISAI dan Indonesia Parliamentary Center (IPC) menyelenggarakan peringatan hari relawan sedunia melalui kegiatan diskusi sehari, pameran lembaga, dan pemutaran foto serta video dokumenter tentang kerja-kerja kesukarelawan, bertempat di Jakarta Media Center. Peringatan hari relawan bertema "Relawan dalam Kehidupan Kita" ini dihadiri oleh 150 orang dari berbagai kalangan seperti LSM, para relawan, perusahaan (GE, Citibank dan Indonesian Business Link) dan media massa. Peringatan ini dilakukan untuk mempromosikan pentingnya kerja-kerja kesukarelawan serta memberikan pengakuan terhadap kontribusi para relawan di sepanjang tahun 2006.

Sejumlah media massa meliput jalannya kegiatan, misalnya SCTV, The Jakarta Post, tabloid Aceh Kita, radio 68H dan i-radio. Sejumlah informasi dan pembelajaran diperoleh pihak penyelenggara mengenai banyaknya ragam aktivitas kesukarelawan yang telah dilakukan oleh masyarakat serta pentingnya pertukaran informasi dan penguatan semangat kesukarelawan di antara relawan maupun bagi organisasi yang melibatkan publik sebagai relawan. Kerja-kerja kesukarelawan ternyata bukan hanya digerakkan oleh Organisasi Non Profit namun juga oleh lembaga profit (perusahaan) sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya (*corporate social responsibility*). Ternyata masih banyak orang yang terketuk hatinya untuk peduli memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan yang tengah carut marut di negeri ini dan oleh karenanya akan selalu ada harapan di masa datang.

Ajang Refleksi Tahunan Relawan Yappika

Tahun 2006 adalah tahun ke empat bagi pelibatan kaum muda sebagai relawan di Yappika. Beragam inovasi telah dilakukan untuk menciptakan ruang bagi publik khususnya kaum muda di Jakarta untuk terlibat dalam kerja-kerja kesukarelawanan di Yappika. Pengalaman konflik di antara relawan, ketidakpuasan, semangat dan kebanggaan atas kerja-kerja



mewarnai Yappika dan para relawan yang membuatnya kian matang. Melalui kegiatan pertemuan tahunan relawan (*volunteer gathering*) yang dilakukan oleh relawan Yappika di Pasir Rengit Bogor tanggal 23 – 25 Maret 2007, beragam pembelajaran dan semangat baru pun muncul. Pertemuan selama tiga hari yang diikuti oleh 24 orang relawan tersebut, berhasil diidentifikasi bersama-sama mengenai berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang telah diikuti relawan di Yappika maupun keterlibatan mereka di lembaga lain selama tahun 2005 - 2006. Tercatat ada 59 kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, diskusi-diskusi, pertemuan rutin, keikutsertaan dalam kegiatan advokasi, kampanye dan riset serta pertemuan-pertemuan relawan yang sifatnya informal. Hampir 75% dari kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diperoleh di Yappika. Sementara itu 25% sisanya mereka peroleh ketika mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LP3ES, Cirrus, LSI, Sucofindo dan Anak Cinta Lingkungan (ACIL). Data ini menunjukkan bahwa jaringan para relawan Yappika semakin meningkat demikian juga kapasitas dan pengetahuan mereka yang diharapkan mampu mempengaruhi tetap tumbuhnya kepedulian sosial pada setiap gerak mereka di masa datang.

Sebagai alumni periode pertama Pelatihan Manajemen Pengembangan Relawan tahun 2005 yang diselenggarakan oleh VSO Bahaginan dan South East Asia Rural Social Institute (SEARSOLIN), sharing yang dilakukan staf Yappika terkait dengan pengalaman pengelolaan relawan dalam konteks Indonesia kepada peserta training serupa yang dilaksanakan pada tahun 2006, cukup membantu para peserta untuk melihat hasil konkret yang telah dicapai melalui penerapan Development Action Plan yang dibuat pada akhir keikutsertaan staf Yappika dalam pelatihan tahun lalu. Salah satu hasil konkretnya adalah perbaikan manual sistem manajemen relawan serta pelatihan bagi fasilitator dalam pengembangan sistem manajemen relawan yang berguna bagi tujuh organisasi non profit yang mengembangkan kesukarelawanan.

(Robby Nazal, Programme Manager of Voluntary Service Overseas Bahaginan Philippines)

Soliditas OMS dalam Advokasi Kebijakan

Belajar dari JDA dalam advokasi RUU Pemerintahan Aceh



Konsolidasi gerakan bukanlah hal yang mudah diwujudkan, apalagi di tengah berbagai pertentangan visi dan strategi di dalam gerakan itu sendiri. Belajar dari berbagai gerakan advokasi yang pernah dilakukan, Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) mencoba untuk meramu kata konsolidasi menjadi sebuah kata kerja dalam melakukan advokasi Rancangan Undang Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) yang kini telah menjadi UU PA.

Dorongan melakukan konsolidasi kelompok masyarakat sipil dalam merumuskan RUU PA dan merancang strategi pengawalannya di Jakarta, merupakan tuntutan dari dinamika yang terus berkembang selama proses perumusan dan pembahasan RUU tersebut. Kebutuhan agar Aceh berada di satu titik dan satu suara dalam memandang RUU PA ketika berhadapan dengan Pemerintah Pusat, menjadi alasan yang kuat untuk membangun aliansi dengan berbagai pihak, baik di Aceh maupun Jakarta. Melalui JDA, berbagai spektrum masyarakat sipil Aceh dan Jakarta yang peduli terhadap perdamaian di Aceh, berkumpul dalam satu wadah untuk mengawal substansi RUU PA.

Sebagai sebuah gerakan advokasi dengan bentuk jaringan, konsolidasi internal JDA harus dijaga, terutama untuk menghadapi tarik menarik kepentingan yang tampak nyata selama pembahasan RUU PA baik di Aceh maupun di Jakarta. Beragamnya spektrum masyarakat sipil dan karakter gerakan setiap kelompok dalam JDA kadang kala menjadi sebuah kekuatan baru, namun tidak jarang kondisi tersebut justru menjadi persoalan yang mengganggu soliditas jaringan. Yappika, sebagai sekretariat JDA di Jakarta tak jarang harus mengambil peran-peran mediasi dan penyeimbang manakala terjadi kemandekan komunikasi atau bahkan ketegangan-ketegangan interelasi yang kadangkala terjadi dalam jaringan.

Bagi Yappika sendiri sebagai sekretariat, pengalaman berjaringan seperti yang terjadi dalam JDA memberikan banyak pembelajaran. Konsolidasi tidak akan pernah datang sendiri, namun harus ditumbuhkan. Benar bahwa isu bersama menjadi salah satu faktor pendorong konsolidasi gerakan, namun sikap egaliter, saling menghargai, memahami, keterbukaan dan rasa saling percaya menjadi prasyarat penting yang harus ditumbuhkembangkan setiap OMS dalam sebuah gerakan dengan beragam entitas.

Membangun Strategi Komunikasi melalui Yappika Life

Tahun 2006 hingga awal 2007 ini, Yappika tengah merancang sebuah media komunikasi baru untuk berhubungan dengan masyarakat luas di Jakarta. Media komunikasi ini dikemas melalui sebuah unit kendaraan yang disebut Yappika Life atau kepanjangan dari Yappika Mobile Library & Cafe, dimana di dalam unit kendaraan tersebut memuat layanan perpustakaan, kafe, penjualan buku murah, internet, iklan layanan masyarakat dan ruang pertemuan dengan kapasitas terbatas.



Yappika Life yang menurut rencana akan diluncurkan pada akhir Mei 2007 ini dirancang untuk menjadi jembatan dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan mengenai berbagai isu sosial, politik, budaya maupun lingkungan hidup kepada masyarakat luas, baik dilakukan oleh Yappika maupun pihak lain yang mempunyai visi, misi dan nilai yang sejalan dengan Yappika. Dengan *tagline* **"Yappika Life: Kami Menawarkan Gagasan untuk Kehidupan yang Lebih Baik"**, Yappika Life akan mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi *target audience*-nya secara langsung dalam rangka mengkomunikasikan berbagai gagasan yang dibawanya.

Sejak awal munculnya ide pembuatan Yappika Life hingga pembuatan konstruksi mobilnya, Yappika telah memperoleh dukungan dari beberapa pihak, yaitu konsultan komunikasi pemasaran yang bekerja secara *voluntary*, pengembangan Standard Operating Procedure (SOP) dan aplikasi perpustakaan online secara semi *voluntary* serta sumbangan buku-buku dari beberapa lembaga non-profit.

Peringatan 15 Tahun Yappika



Tahun 2006, Yappika telah memasuki usia 15 tahun. Sebuah perjalanan yang tergolong lama untuk sebuah organisasi non-profit. Berbagai pergulatan pemikiran sekaligus aksi nyata pun silih berganti, seperti layaknya sebuah kontinum kehidupan yang selalu tumbuh. Sejak pendiriannya pada tahun 1991, Yappika telah terlibat dalam kerja-kerja penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS), mulai dari pemberian

dukungan pada perguliran isu dan kerja-kerja OMS di berbagai daerah di sektor sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, politik, resolusi konflik, pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu, advokasi kebijakan nasional, mengembangkan jaringan-jaringan masyarakat sipil, kampanye pluralisme, mendorong *good governance* di era desentralisasi, mengembangkan volunteerism hingga kerja-kerja riset indeks masyarakat sipil.

Peringatan 15 tahun Yappika dirayakan pada tanggal 15 Juli 2006 dalam sebuah pertemuan yang bernuansa santai dengan mengundang berbagai kolega yang selama ini telah berhubungan dengan Yappika seperti LSM, akademisi, wartawan, sektor privat dan pemerintah. Pertemuan ini sekaligus digunakan sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada para tamu undangan mengenai sektor isu yang akan ditekuni Yappika selama tiga tahun ke depan, yaitu **mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas**. Sebuah pilihan isu yang telah digodog melalui serangkaian diskusi panjang berdasarkan kepada dinamika Indonesia masa kini, masukan dari beberapa ahli serta berbagai pembelajaran atas kerja-kerja Yappika sebelumnya. Peringatan 15 tahun Yappika ini dimeriahkan oleh monolog Butet Kertarejasa yang berbicara mengenai pelayanan publik di Indonesia; hiburan lagu-lagu dari kelompok acapella Jamaica Cafe; pemutaran film dokumenter pendek mengenai perjalanan 15 tahun Yappika serta pemberian penghargaan kepada almarhum Bapak Kartjono, salah satu tokoh yang paling berjasa dalam membangun fondasi pada saat awal berdirinya Yappika.

Kampanye Hak Pelayanan Kesehatan melalui Penyuluhan & Pemeriksaan Kesehatan Payudara

Pada bulan Juli 2006, Yappika bekerjasama dengan Yayasan Kanker Payudara Jakarta (YKPJ) Rumah Sakit Dharmais mengadakan kampanye hak pelayanan publik di bidang kesehatan melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan payudara kepada kaum perempuan usia 35 – 55 tahun Jakarta. Kegiatan dilakukan di 5 lokasi yaitu di kantor Yappika (kelurahan Bidara Cina), Pondok Gede, Pasar Minggu, Pangkalan Jati dan Semper Barat. YKPJ menurunkan satu unit mobil mammography beserta tim dokter dan radiolog untuk memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan payudara. Informasi singkat mengenai hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang seharusnya dipenuhi oleh negara, dilakukan di sela-sela penyuluhan dan melalui brosur yang dibagikan ke seluruh peserta.



Kegiatan ini dorganisir oleh kurang lebih 25 orang relawan yang berdomisili di masing-masing lokasi kegiatan, memeriksa 161 perempuan menggunakan mammography dan secara keseluruhan dihadiri oleh kurang lebih 450 orang yang turut mendengarkan acara penyuluhan kesehatan payudara. Kampanye yang dilakukan dengan melakukan aksi yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat ini ternyata cukup efektif menarik perhatian mereka yang pada awalnya beberapa di antaranya mempunyai pandangan negatif terhadap LSM.

Keikutsertaan dalam AEPF di Helsinki

Yappika mendapatkan kesempatan diantara 450 perwakilan dari LSM, organisasi rakyat, kelompok keagamaan di wilayah Asia dan Eropa untuk menghadiri pertemuan Asia Europe People Forum 6 (AEPF) di Helsinki pada tanggal 3 – 6 September 2006. Pertemuan AEPF 6 bertema *People's Vision: Building Solidarity Across Asia and Europe – Towards a Just, Equal and Sustainable World* merupakan forum yang sengaja diinisiasi oleh lembaga organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia dan Eropa untuk membahas agenda dan dampak globalisasi terhadap gerakan sosial masyarakat sipil. Forum ini merupakan forum tandingan dengan agenda yang sama yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan Asia dan Eropa yang tergabung dalam The Asia Europe Meeting (ASEM).

Pertemuan ASEM sama sekali tidak memberikan ruang keterlibatan masyarakat sipil, namun rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan AEPF menjadi catatan penting yang disampaikan pada sidang ASEM.

AEPF 6 menghasilkan deklarasi yang antara lain berisikan: (1) tuntutan agar ASEM mendorong adanya kemitraan yang setara antara Asia-Eropa, yang berdasarkan pada dimensi sosial yang merata pada semua aspek dalam penyelenggaraan ASEM, (2) tuntutan agar ASEM melakukan mekanisme konsultasi dan implementasi yang dapat memungkinkan orang dan organisasi rakyat, termasuk Serikat Buruh, untuk berpartisipasi secara resmi pada pertemuan, (3) meminta kepada seluruh organisasi rakyat di Asia dan Eropa untuk memperkuat jaringan dan saling bekerja sama, serta bergabung dengan AEPF untuk mendorong ASEM agar menciptakan keamanan kemanusiaan yang lebih baik di Asia dan Eropa sehingga terjadi penyatuan yang berpusatkan pada kerakyatan untuk kedamaian, kesetaraan dan keberlanjutan pembangunan, demokrasi, kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta kemajuan sosial di wilayah regional maupun seluruh dunia.

Menurut saya sebagai praktisi kesehatan, kerja-kerja advokasi mengenai pelayanan publik yang dilakukan Yappika adalah pilihan yang tepat. Kerja advokasi tersebut, khususnya isu pelayanan kesehatan, seharusnya disertai dengan tindakan nyata yang mengena di masyarakat sesuai dengan masalah yang ada, memberi gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan ikut membantu menyelesaikan masalah yang muncul.

(dr. Kardinah, Radiologist Specialist Rumah Sakit Dharmais dan aktif di Yayasan Kesehatan Kanker Payudara Jakarta)

Sinergi Kerja Yappika dalam Kemitraan

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Yappika menjalankan berbagai program yang selalu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan lembaga lain maupun para individu. Selama periode April 2006 – Maret 2007, berbagai kegiatan dan kemitraan telah kami bangun, di antaranya:

Program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)

Yappika bekerjasama dengan USC Canada dan Canadian International Development Agency (CIDA) memberikan dukungan dana maupun asistensi teknis kepada 24 lembaga mitra di daerah, yaitu:

1. **Papua:** Triton (Sorong), Yayasan Nanimi Wabili Su (YNWS) - Sorong, KIPRA (Jayapura)
2. **Maluku Tenggara:** Yayasan Hivlak (Tual)
3. **Sulawesi Selatan:** Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo, Yayasan Tumbuh Mandiri (YTMI) - Makassar, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) – Makassar.
4. **Sulawesi Tengah:** Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) -Palu, Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Palu, Yayasan Masyarakat Madani (YAMMI) - Palu, Dopalak Indonesia (Donggala)
5. **Nusa Tenggara Timur:** Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA), Yayasan Bina Sejahtera (YBS) Lembata, Yayasan Flores Sejahtera (SANRES)
6. **Jawa Timur:** Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) - Jember, SD INPERS (Jember), IDFOS (Bojonegoro), MCW (Malang)
7. **Aceh:** Aceh Development Fund (ADF – Banda Aceh), Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK – Meulaboh)
8. **Jakarta:** Jaringan Tambang (JATAM), Civic Education & Budget Transparency Advocacy (CIBA)

Advokasi RUU Pelayanan Publik

Yappika bekerjasama dengan USC Canada dan CIDA melalui program TPLD memfasilitasi berbagai kegiatan advokasi RUU Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dimana Yappika berperan sebagai sekretariat jaringan. Jaringan MP3 saat ini beranggotakan 33 lembaga yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Malang, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Program Penguatan Kapasitas Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kabupaten

Yappika bekerjasama dengan Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) menjalankan program di 8 Kabupaten:

1. Jaringan Masyarakat Sipil (Jaringmas) Bantaeng (Sulawesi Selatan)
2. Aliansi Masyarakat Sipil Turatea (AMST) Jeneponto (Sulawesi Selatan)
3. Jaringan Masyarakat Sipil Buton (Sulawesi Tenggara)
4. Jaringan Masyarakat Sipil Muna (Sulawesi Tenggara)
5. Kelompok Kerja Masyarakat Sipil (KKMSK) Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat)
6. Kelompok Kerja Masyarakat Sipil (KKMSK) Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat)
7. Jaringan Masyarakat Sipil Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur)
8. Simpul 16 ++ Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur)

Di tengah-tengah proses politik Indonesia yang telah menampakkan hasil yang jelas, yakni pembajakan demokrasi dan desentralisasi oleh kelompok elit lama Orde Baru, Yappika terus berupaya melakukan inovasi untuk mendorong pemberdayaan warga negara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Oleh proses refleksi dan pembelajaran yang kontinyu dengan segala pihak, staf organisasi ini pun tidak segan-segan membongkar cara berpikir ortodoks, menggugat efektivitas strategi pemberdayaan yang telah diterapkan sampai sejauh ini, dan kemudian mengembangkan strategi-strategi pemberdayaan yang inovatif. Mudah-mudahan karakter seperti ini dapat terus dipertahankan sebagai ciri khas Yappika.

(Johnly E.P. Purba, Senior Program Officer for Civil Society, The Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme/ACCESS)

No. : A/338/SA/Azy/07

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth,
Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09
Jakarta Timur 13350

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI per tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sesuai dengan catatan 3a, laporan keuangan disajikan dengan basis kas yang dimodifikasi, yang merupakan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sesuai dengan catatan 8 atas laporan keuangan, YAPPIKA mencatat aktiva tetap yang diperoleh dari dana hibah dan mencatat penyusutannya, meskipun belum memiliki surat hibah aktiva tetap dari donor.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA, tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang dijelaskan pada catatan 3a.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.



Drs. Then Kusnawana, Ak
Register Negara No. D-1828
Izin Akuntan Publik No. 02.1.0795

30 Mei 2007

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan**

Per 31 Desember 2006 dan 2005

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2006	2005
Aktiva			
Aktiva lancar			
Kas dan setara kas	4	3.180.289.047	4.204.469.861
Piutang program - bersih	3b, 5	418.394.279	408.618.976
Piutang lain-lain	6	393.013.970	84.523.537
Uang muka	7	1.997.594.266	854.539.733
Jumlah aktiva bersih		5.989.291.562	5.552.152.107
Aktiva tidak lancar			
Aktiva tetap	3c, 8		
Nilai perolehan		730.048.181	730.048.181
Akumulasi penyusutan		680.091.140	591.876.824
Jumlah aktiva tidak lancar		49.957.041	138.171.357
Jumlah aktiva		6.039.248.603	5.690.323.464

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan posisi keuangan (lanjutan)

Per 31 Desember 2006 dan 2005

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2006	2005
Kewajiban dan aktiva bersih			
Kewajiban			
Kewajiban lancar			
Hutang lain-lain	9	625.154.714	479.506.983
Hutang pajak	10	29.988.253	16.071.745
Jumlah kewajiban lancar		655.142.967	495.578.728
Aktiva bersih			
Sisa dana			
Terikat	3d 11a	3.211.216.350	3.147.168.049
Tidak terikat	11b	2.172.889.286	2.047.576.687
Jumlah aktiva bersih		5.384.105.636	5.194.744.736
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih		6.039.248.603	5.690.323.464

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan Aktivitas

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2006		2005	
		Terikat	Tidak terikat	Jumlah	Jumlah
Penerimaan	12				
Penerimaan program		13.389.052.132	-	13.389.052.132	13.974.663.829
Penerimaan lain-lain		-	509.805.793	509.805.793	417.188.087
Jumlah penerimaan		13.389.052.132	509.805.793	13.898.857.925	14.391.851.916
Pengeluaran					
Canadian International Development Agency (CIDA) melalui Unity Service Committee of Canada (USC - Canada) - PPD Phase II		7.437.062.924	-	7.437.062.924	9.670.205.336
United Nations Development Programme (UNDP - Partnership)		1.694.509.805	-	1.694.509.805	142.356.396
CSO - Capacity Building in Aceh		1.631.463.282	-	1.631.463.282	-
Democratize Reform Support Program (DRSP) - Research Triangle Institute (RTI)		1.058.716.675	-	1.058.716.675	-
ACCESS		791.123.578	-	791.123.578	306.802.133
ACCESS National		566.043.021	-	566.043.021	39.215.603
The Asia Foundation		126.084.346	-	126.084.346	-
USAID/I		-	-	-	544.331.871
Canadian International Development Agency (CIDA)		-	-	-	322.334.487
TCP3 - Ford Foundation		-	-	-	273.589.646
OXFAM		-	-	-	259.489.600
Research Triangle Institute (RTI)		-	-	-	244.864.037
HIVOS - Transparency International Indonesia (Tsunami Aceh)		-	-	-	123.742.330
Overseas Development Institute (ODI)		-	-	-	97.039.930
TCP3 - AusAID		-	-	-	90.977.350
USC-Canada		-	-	-	167.317.990
Administrasi		-	-	-	627.147.743
Jumlah pengeluaran		13.325.003.831	384.278.302	13.709.282.133	12.909.814.512
Sisa dana, tahun berjalan		64.048.301	125.527.491	189.575.792	1.482.037.404
Sisa dana, awal		3.147.168.049	2.047.576.687	5.194.744.736	3.826.099.935
Koreksi		-	(214.892)	(214.892)	(113.392.603)
Sisa dana, akhir		3.211.216.350	2.172.889.286	5.384.105.636	5.194.744.736

Liha catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan arus kas**

Per 31 Desember 2006 and 2005

(Dalam Rupiah)

	2006	2005
Arus kas dari aktivitas operasi		
Sisa dana, tahun berjalan	189.575.792	1.482.037.404
Penyesuaian :		
Koreksi sisa dana	(214.892)	(113.392.603)
Penyusutan	88.214.315	38.548.600
Kenaikan (penurunan) pada:		
Piutang program - bersih	(9.775.303)	166.237.685
Piutang lain-lain	(308.490.432)	62.489.899
Uang muka	(1.143.054.533)	560.133.391
Kenaikan (penurunan) pada :		
Hutang lain-lain	145.647.731	(42.077.772)
Hutang pajak	13.916.508	3.670.371
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.024.180.814)	2.157.646.975
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Perolehan aktiva tetap	-	(36.164.000)
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	(36.164.000)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.024.180.814)	2.121.482.975
Saldo kas dan setara kas awal tahun	4.204.469.861	2.082.986.886
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	3.180.289.047	4.204.469.861

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**LAPORAN AKTIVITAS DAN SALDO DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2005 DAN 2004**

DECRPTION	2006	2005
PENERIMAAN		
Kontribusi Lembaga Donor		
01. USAID		513,811,828
02. USC Canada (PPD 2)	5,601,893,530	10,335,648,608
03. USC Canada (ANCORS)	5,446,333,755	359,361,663
04. ACCESS	646,790,800	1,683,237,546
05. Partnership	-	68,027,210
06. HIVOS - Transparancy International Indoensia (TI)		219,525,000
07. OXFAM		167,290,780
08. UCS Canada - Tsunami Aceh Fund		212,738,256
09. Research Triangale Institute (RTI)	539,171,914	300,000,000
10. ACCESS National	452,609,245	115,022,938
11. Overseas Development Institute (ODI)		
12. The Asia Foundation	91,100,000	
13. Democratic Reform Support Project (DRSP)	602,549,885	
Total Kontribusi Lembaga Donor	13,380,449,129	13,974,663,829
14. YAPPIKA	518,408,796	417,188,087
TOTAL PENERIMAAN	13,898,857,925	14,391,851,916
PENGELUARAN		
Manajemen Kantor		
01. Gaji untuk manajemen (12 orang)	960,262,142	800,106,340
02. Gaji untuk pelaksanaan program (10 orang)	911,541,539	644,169,988
03. Biaya kantor	670,627,991	421,729,952
04. Biaya perjalanan dan pertemuan	672,958,994	259,491,616
05. Peningkatan kapasitas staf	74,796,490	55,378,452
Sub total Manajemen Kantor	3,290,187,156	2,180,876,348
Aktivitas Program		
06. Program Kemitraan dan Pembangunan - PPD 2	5,340,953,926	8,304,160,171
07. Penguatan Kapasita di Aceh - ANCORS	953,102,820	
08. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai di Aceh		432,669,495
09. ndeks Masyarakat Sipil di Kabupaten - ACCESS	602,720,796	214,487,757
10. Indeks Masyarakat Sipil di National - ACCESS	447,941,314	7,065,000
11. Insiatif Masyarakat Sipil untuk Kesepakatan Perdamaian di Aceh		322,534,487
12. Program Desentralisasi - Parnership	1,623,965,783	106,709,090
13. Advocacy Koalisi Kebijakan Partisipatif		364,566,996
14. Membuat asesment tentang kebijakan lingkungan-DRSP	1,058,716,675	206,276,200
15. Membuat assessment tentang kebijakan lingkungan - TAF	126,084,546	
16. Program Tsunami - USC Canada		167,317,990
17. Program Tsunami - Hivos / TI		117,769,380
18. Program Tsunami - OXFAM		259,489,600
19. Overseas Development Institute		97,039,930
20. Dukungan Program - Yappika	265,609,117	128,852,068
Sub total Aktivitas Program	10,419,094,977	10,728,938,164
TOTAL PENGELUARAN	13,709,282,133	12,909,814,512
Kelebihan Penerimaan atas Pengeluaran	189,575,792	1,482,037,404
Saldo Awal	5,194,744,736	3,826,099,935
Koreksi atas Saldo dana	(214,892)	(113,392,603)
Saldo Akhir	5,384,105,636	5,194,744,736